

KESENJANGAN GENDER PADA BEBERAPA INDIKATOR MUTU DAN RELEVANSI PENDIDIKAN DI PROVINSI BALI

Oleh: Ni Luh Arjani

Abstrak

Sampai saat ini kesenjangan gender di bidang pendidikan masih terjadi baik pada aspek akses dan pemerataan, management pendidikan maupun pada aspek mutu dan relevansi pendidikan. Aspek Mutu dan relevansi pendidikan dapat diukur dari beberapa indikator seperti kelayakan guru menurut tingkat pendidikannya, angka mengulang kelas, angka putus sekolah, dan angka kelulusan siswa. Pada semua indikator ini masih nampak terjadi kesenjangan gender secara relatif.

Kata kunci: Gender, mutu dan relevansi, pendidikan.

1. Pendahuluan

Dalam kehidupan masyarakat, pendidikan memegang peranan yang sangat penting karena baik buruknya kualitas sumberdaya manusia sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk dari suatu masyarakat, maka semakin baik juga kualitas sumberdaya manusianya. Pendidikan dapat memberikan nilai-nilai kognitif, afektif dan psikomotorik kepada setiap individu disamping juga dapat digunakan sebagai alat untuk mentranspormasikan nilai-nilai yang berguna dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu pendidikan bagi setiap individu baik laki-laki maupun perempuan sangatlah penting.

Secara normatif, persamaan hak untuk memperoleh pendidikan baik bagi penduduk laki-laki maupun perempuan sudah tertuang, baik dalam UUD

1945 maupun dalam UU Sisdiknas Th. 2003. Dalam UUD 45 terutama dalam pasal 31 ayat 1 dinyatakan bahwa” Setiap warga negara berhak atas pengajaran”. Rumusan itu mengandung makna bahwa setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Di samping itu, Undang-Undang No.7 tahun 1984 tentang Konvensi Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan juga menjadi landasan hukum yang kuat dan mengikat semua pihak supaya berupaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai bidang termasuk dalam bidang pendidikan.

Dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional terutama dalam Bab III pasal 4 ayat 1 juga menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminasi dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Pada Bab IV, Pasal 5 Ayat 1 dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pendidikan yang bermutu.

Pengembangan kualitas sumberdaya manusia merupakan bagian dari program-program pembangunan di Indonesia terkait erat dengan komitmen internasional dalam mewujudkan Millenium Development Goals (MDGs) yang telah dicanangkan sejak tahun 2000 melalui deklarasi Millenium Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Komitmen MDGs yang terkait dengan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender di bidang pendidikan tercantum pada *Goals* ke 2 yakni mencapai pendidikan dasar bagi semua dengan tujuan bahwa pada tahun 2015 semua anak baik laki-laki maupun perempuan dapat mengenyam pendidikan dasar. Dan ini juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan *Goals* ke 3 MDGs yaitu mempromosikan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan dengan tujuan untuk menghapuskan segala bentuk disparitas gender dalam pendidikan dasar dan menengah menjelang tahun 2015.

Sebelum komitmen MDGs ini dicetuskan, PBB juga telah menyetujui konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (***Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against***

Women atau disingkat CEDAW). Selanjutnya pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi CEDAW melalui UU. No. 7/1984. UU ini kemudian menjadi salah satu landasan hukum yang kuat dan mengikat semua pihak supaya berupaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai bidang termasuk dalam bidang pendidikan. Sementara itu, Indonesia sebagai salah satu anggota UNESCO telah ikut meratifikasi Kebijakan Pendidikan Untuk Semua (Education for All) yang telah disepakati di Dakar Senegal. Kesepakatan Dakar ini menuntut peningkatan komitmen pemerintah dalam menggerakkan pembangunan pendidikan secara merata dalam arti baik untuk anak laki-laki maupun perempuan, termasuk anak yang dalam keadaan sulit dan etnik minoritas. Dalam kerangka aksi Dakar Pendidikan untuk semua (PUS), pemerintah di semua negara termasuk Indonesia berjanji untuk mencapai tujuan-tujuan antara lain sebagai berikut:

1. Memperluas dan memperbaiki keseluruhan perawatan dan pendidikan anak usia dini (PAUD), terutama bagi anak-anak yang sangat rawan dan tidak beruntung;
2. Menjamin bahwa menjelang tahun 2015 semua anak, khususnya anak perempuan, anak-anak dalam keadaan sulit dan mereka yang termasuk etnik minoritas mempunyai akses pada dan menyelesaikan pendidikan dasar yang bebas dan wajib dengan kualitas yang baik.
3. Mencapai perbaikan 50 % pada tingkat keniraksaraan orang dewasa menjelang tahun 2015, terutama bagi kaum perempuan dan akses yang adil pada pendidikan dasar dan pendidikan berkelanjutan bagi semua orang dewasa
4. Penghapusan kesenjangan gender pada pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2005 dan pencapaian kesetaraan gender dalam pendidikan pada tahun 2015 dengan fokus pada kepastian akses anak perempuan terhadap pendidikan dasar yang bermutu
5. Menjamin bahwa kebutuhan belajar semua manusia muda dan orang dewasa terpenuhi melalui akses yang ada pada program-program belajar dan keterampilan hidup yang sesuai.

Semua kebijakan tersebut di atas, selanjutnya ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah yang dituangkan dalam Propeda, Repetada dan Renstra yang saat ini berubah menjadi RPJMD dan SKPD. Dengan adanya landasan normatif seperti tersebut di atas, semestinya ketimpangan gender di bidang pendidikan tidak terjadi. Namun pada kenyataannya berbagai upaya yang ditempuh oleh pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di bidang pendidikan belum berhasil. Hal ini terbukti dengan masih terjadinya ketimpangan gender diberbagai bidang termasuk di bidang pendidikan.

Dari hasil kajian untuk penyusunan Profil Gender Bidang Pendidikan di Provinsi Bali yang dilakukan oleh Pusat Studi Wanita Unud (2007) menunjukkan bahwa di Provinsi Bali secara umum masih terjadi kesenjangan gender di bidang pendidikan baik yang berkaitan dengan akses dan pemerataan, management pendidikan serta pada aspek mutu dan relevansi pendidikan.

Kesenjangan gender pada **mutu dan relevansi pendidikan** tampak pada beberapa indikator pendidikan, seperti pada rata-rata lama sekolah, pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk, angka melek huruf, angka mengulang kelas, dan angka putus sekolah. Pada kesemua indikator ini masih nampak terjadi kesenjangan gender yang cukup menonjol. Oleh karena itu untuk mempercepat terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender khususnya pada mutu dan relevansi pendidikan, maka pemerintah mengambil suatu strategi pengarusutamaan gender yang dituangkan dalam Inpres No. 9 tahun 2000 dan dilengkapi dengan Kepmendagri 132 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan nasional. Di tingkat daerah hal ini ditindaklanjuti dengan penyusunan Kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender. Hal ini penting dilakukan untuk: a. meningkatkan kesempatan dan manfaat yang dapat diperoleh melalui penghapusan diskriminasi yang sistematis terhadap laki-laki dan perempuan; b. mengintegrasikan upaya untuk menindaklanjuti permasalahan dan kebutuhan laki-laki dan perempuan secara langsung maupun tidak langsung; c. meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan sebagai salah satu perwujudan hak

asasi manusia. Selain penyusunan kebijakan yang responsif gender, juga dilakukan pembentukan kelompok kerja (pokja) pengarusutamaan gender di bidang pendidikan. Melalui upaya yang dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat, diharapkan pembangunan pendidikan yang adil gender, *education for all* dapat cepat terwujud sehingga kesepakatan MDGs dapat tercapai pada saat yang telah ditentukan.

2. Kesenjangan Gender Pada Beberapa Indikator Mutu dan Relevansi Pendidikan di Provinsi Bali.

Pembangunan dibidang pendidikan harus mampu menghasilkan pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan pembangunan itu sendiri. Mutu atau kualitas pendidikan dapat diukur dari berbagai indikator, seperti angka mengulang kelas, angka putus sekolah, angka kelulusan siswa, dan sebagainya. Mutu pendidikan ini tergantung banyak aspek, diantaranya ketersediaan sarana dan prasarana (gedung sekolah, kurikulum, buku ajar, dan lain-lain), ketersediaan tenaga guru yang layak., serta proses belajar mengajar yang berkualitas.

a. Kelayakan Guru

Kelayakan guru meliputi kompetensinya serta relevansi keahliannya (ijazah pendidikannya) dengan bidang studi yang diajar. Pada masa lalu seorang guru cukup memiliki ijazah terakhir dari sekolah pendidikan guru,. Namun dalam perkembangan terakhir, berdasarkan Undang-undang Tentang Guru dan Dosen, seorang guru minimal berpendidikan Strata 1 (S1). Karena itu, pendidikan terakhir guru pada masing-masing jenis kelamin penting ditampilkan untuk melihat profil gender pada indikator mutu dan relevansi pendidikan. dalam profil gender dibidang mutu dan relevansi pendidikan.

Proporsi Guru SD Menurut Tingkat Pendidikannya

Belakangan ini sekolah SPG sudah dihapus oleh pemerintah kemungkinan dengan alasan karena jumlah guru SD dianggap sudah mencukupi atau karena alasan tuntutan kemajuan pendidikan sehingga guru SD dianggap tidak cukup hanya berpendidikan SPG. Seiring dengan dihapusnya sekolah guru ini, tuntutan pendidikan untuk seorang guru SD saat ini tidak cukup hanya pendidikan SPG/SMA sederajat, tetapi diharapkan paling tidak memiliki pendidikan terakhir Diploma tiga (D3) atau Sarjana Strata satu (S1). Undang Undang Guru dan Dosen yang telah dikeluarkan oleh pemerintah juga menuntut seorang guru dan dosen untuk memenuhi sertifikasi sesuai dengan profesinya masing-masing. Dengan adanya tuntutan pendidikan yang lebih tinggi dari seorang guru disertai dengan adanya peluang untuk mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maka saat ini guru SD yang ada di Bali sudah cukup banyak yang memiliki ijazah terakhir Diploma/S1. Tabel 1 memaparkan jumlah guru SD di Bali menurut ijazah yang ditamatkan tahun 2006.

Tabel 1.
Persentase Guru SD Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah yang Ditamatkan di Kabupaten/kota di Bali, 2006.

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2006								
		SLTA			Dip/SarMud			S1, S2, S3		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
1.	Buleleng	12.91	9.73	11.42	67.30	73.81	70.35	19.79	16.46	18.23
2.	Jembrana	3.89	1.27	2.71	62.05	66.77	64.17	34.07	31.96	33.12
3.	Tabanan	13.88	14.55	14.23	71.57	74.44	73.08	14.56	11.01	12.69
4.	Badung	14.05	12.98	13.48	55.78	57.60	56.76	30.16	29.42	29.77
5.	Gianyar	13.73	13.52	13.63	70.89	74.59	72.71	15.38	11.89	13.66
6.	Klungkung	14.29	9.49	12.09	69.21	77.09	72.82	16.50	13.42	15.09
7.	Bangli	27.57	22.69	25.70	62.03	69.51	64.90	10.40	7.80	9.40
8.	Karangasem	19.53	17.24	18.55	60.83	70.71	65.06	19.64	12.05	16.39
9.	Denpasar	15.25	14.21	14.52	38.01	48.98	45.74	46.73	36.80	39.74
	BALI	15.18	13.11	14.14	63.08	66.77	64.94	21.74	20.12	17.80

Sumber : Diolah dari Statistik Persekolahan SD/MI Provinsi Bali, 2004,2005,2007

Dari tabel ini nampak bahwa pada tahun 2006 di setiap kabupaten/kota guru SD yang berpendidikan SLTA persentasenya relative kecil yakni rata-rata di bawah 15%. Dari semua Kabupaten/kota, Kabupaten Jembrana persentase guru SD yang berpendidikan SLTA nampak paling kecil yakni hanya 2,71% ,

selebihnya (97,29%) sudah berpendidikan Diploma dan Sarjana. Sementara Kabupaten yang lainnya persentase guru SD yang berpendidikan SLTA masih di atas 10%. Dalam hal ini nampak kesenjangan gender masih terjadi tetapi tidak terlalu menonjol. Guru yang hanya berpendidikan SMA, persentase laki-laki lebih besar dari pada perempuan, yang berpendidikan Diploma/Sarjana Muda persentase perempuan lebih tinggi dari laki-laki, dan pendidikan sarjana persentase laki-laki lebih besar dari perempuan.

Proporsi Guru SMP Menurut Tingkat Pendidikannya

Pada jenjang pendidikan SMP, jumlah guru yang memiliki ijazah terakhir SLTA masih relatif tinggi yakni sebagian besar masih di atas 15%. Dikatakan tinggi karena untuk jenjang pendidikan SMP paling tidak persentase guru yang berpendidikan Diploma/Sarjana sepantasnya lebih banyak dari guru SD dengan pendidikan yang sama. Secara rinci data guru menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan seperti tampak pada Tabel 2

Tabel. 2
Persentase Guru SMP Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah yang Ditamatkan di Kabupaten/kota di Bali, 2006

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2006								
		SLTA			Dip/SarMud			S1, S2, S3		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1.	Buleleng	34.50	14.13	23.19	28.74	85.87	76.44	0.83	-	0.37
2.	Jembrana	12.72	23.70	16.19	10.34	18.96	16.34	72.15	57.35	67.47
3.	Tabanan	16.13	17.09	16.52	11.51	25.38	21.80	64.52	57.53	61.69
4.	Badung	32.89	19.18	27.86	5.60	3.37	6.84	58.27	77.44	65.30
5.	Gianyar	21.06	18.11	20.04	51.32	81.70	79.70	0.30	0.18	0.26
6.	Klungkung	25.55	16.74	21.99	12.59	17.67	19.74	53.31	65.58	58.27
7.	Bangli	14.25	28.29	19.18	15.41	17.56	21.58	62.01	54.15	59.25
8.	Karangasem	16.69	19.01	17.71	8.94	17.82	16.75	67.39	63.17	65.54
9.	Denpasar	22.40	29.77	25.56	8.19	11.51	13.13	63.25	58.72	61.31
	BALI	22.47	20.47	21.65	17.84	35.08	32.21	47.30	44.45	46.09

Sumber : Diolah dari Statistik Persekolahan SMP, SMA, SMK Provinsi Bali, 2004,2005,2007

Dari Tabel 1.2 nampak bahwa pada tahun 2005 Kabupaten yang persentase guru SMPnya hanya berijazah SLTA adalah kabupaten Gianyar yakni 27,43%, sedangkan yang persentasenya paling rendah adalah kabupaten Tabanan yakni hanya 14,84%. Pada tahun 2006 nampak terjadi perubahan

dimana persentase terendah guru SMP yang berpendidikan SLTP adalah Kabupaten Jembrana, sementara persentase tertinggi adalah kabupaten Badung yakni sebesar 27,86%. Dilihat dari perspektif gender nampak bahwa persentase guru perempuan yang hanya berpendidikan SLTA lebih kecil dari pada laki-laki baik tahun 2005 maupun tahun 2006.

Proporsi Guru SMA Menurut Tingkat Pendidikannya

Sampai tahun 2006 jumlah guru SMA di Bali lebih dari empat ribu orang. Dari jumlah ini ternyata masih ada diantaranya yang berpendidikan sejajar dengan jenjang pendidikan siswa yang di didik yakni berijasah SLTA. Idealnya seorang guru SMA paling tidak ia memiliki ijazah yang lebih tinggi dari SL:TA seperti Diploma/Sarjana Muda/Sarjana. Pada tahun 2006 ternyata di setiap kabupaten/kota masih ada guru SMA yang berpendidikan SLTA. Persentase tertinggi guru SMA yang berpendidikan SLTA adalah di kabupaten Klungkung yakni 4,8 %, sementara persentase yang paling rendah adalah di kabupaten Bangli yakni hanya 0,7%. Untuk lebih jelasnya keadaan guru SMA menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan seperti tertera pada Tabel: 3.

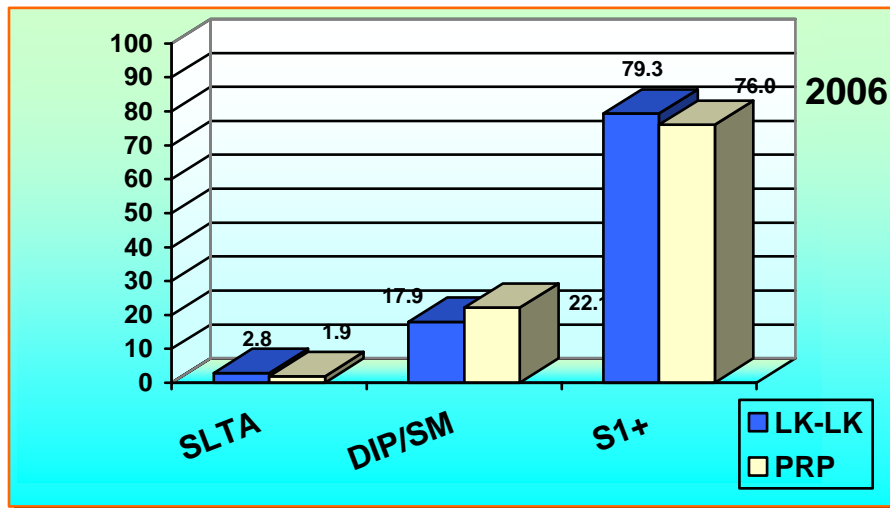
Tabel. 3
Persentase Guru SMA Menurut Jenis Kelamin dan Ijasah yang Ditamatkan di Kabupaten/kota di Bali, 2006

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2006								
		SLTA			Dip/SarMud			S1, S2, S3		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
1.	Buleleng	1.2	3.7	1.4	7.0	52.4	11.8	91.9	43.9	86.8
2.	Jembrana	4.5	-	2.5	14.9	12.6	13.9	80.6	87.4	83.7
3.	Tabanan	2.8	1.7	2.4	5.3	5.7	5.4	91.9	92.6	92.2
4.	Badung	4.2	3.0	3.8	9.3	18.6	12.6	86.4	78.4	83.6
5.	Gianyar	3.1	1.4	2.5	96.7	98.6	97.3	0.2	-	0.1
6.	Klungkung	4.7	5.3	4.8	7.5	1.8	6.0	87.8	92.9	89.1
7.	Bangli	0.9	-	0.7	10.6	8.8	10.1	88.4	91.3	89.2
8.	Karangasem	4.0	3.2	3.7	4.8	6.8	5.5	91.2	90.0	90.8
9.	Denpasar	2.1	0.9	1.7	5.4	14.2	8.6	92.5	84.8	89.8
	BALI	2.8	1.9	2.5	17.9	22.1	19.2	79.3	76.0	67.2

Sumber : Diolah dari Statistik Persekolahan SMP, SMA, SMK Provinsi Bali, 2004,2005,2007

Ditinjau dari perspektif gender nampak guru perempuan yang berpendidikan SLTA lebih kecil persentasenya dibandingkan guru laki-laki. Hal ini kemungkinan terjadi karena guru olah raga yang umumnya tamatan SLTA masih didominasi oleh guru laki-laki. Untuk lebih jelasnya hal ini tergambar pada grafik 1 .

Grafik: 1
 Persentase Guru SMA Menurut Jenjang Pendidikan Yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Provinsi Bali Tahun 2006



Proporsi Guru SMK Menurut Tingkat Pendidikannya

Seperti halnya guru SMA, di SMKpun masih ada guru yang mempunyai pendidikan terakhir SLTA. Pada tahun 2006 persentase tertinggi guru SMK yang berpendidikan SLTA adalah di kabupaten Badung yakni sebesar 10,30%, sedangkan persentase paling rendah adalah di kabupaten Buleleng yakni hanya 2,02%. Pada tahun 2006 sebagian besar guru SMK berpendidikan sarjana. Secara rinci hal ini seperti tergambar pada Tabel 4. Proporsi guru laki-laki dan perempuan yang berpendidikan SLTA nampaknya tidak terlalu jauh berbeda. Persentase laki-laki dan perempuan yang berpendidikan Dip/Sar.Mud berbanding terbalik dengan yang berpendidikan S1, S2 dan S3. Persentase perempuan yang berpendidikan Diploma/Sar Mud lebih besar dari pada laki-laki

sementara yang berpendidikan S1, S2 dan S3 persentase perempuan lebih kecil dari pada laki-laki.

Tabel. 4
Persentase Guru SMK Menurut Jenis Kelamin dan Ijasah yang Ditamatkan di Kabupaten/kota di Bali, 2006

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2006								
		SLTA			Dip/SarMud			S1, S2, S3		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
1.	Buleleng	1.90	2.24	2.02	27.00	4.48	19.40	71.10	93.28	78.59
2.	Jembrana	7.64	8.11	7.79	14.01	14.86	14.29	78.34	77.03	77.92
3.	Tabanan	5.97	25.00	8.00	28.36	-	25.33	65.67	75.00	66.67
4.	Badung	10.00	10.83	10.30	7.86	8.28	8.01	82.14	80.89	81.69
5.	Gianyar	6.32	3.66	5.60	14.00	11.59	13.34	79.68	84.76	81.05
6.	Klungkung	4.17	7.41	5.05	25.00	11.11	21.21	70.83	81.48	73.74
7.	Bangli	6.25	2.22	5.10	5.36	8.89	6.37	88.39	88.89	88.54
8.	Karangasem	3.57	42.86	5.88	10.71	-	10.08	85.71	57.14	84.03
9.	Denpasar	2.63	2.57	2.60	25.30	46.69	33.72	72.08	50.74	63.68
	BALI	5.36	5.81	5.50	18.58	20.07	19.03	76.06	74.12	65.21

Sumber : Diolah dari Statistik Persekolahan SMP, SMA, SMK Provinsi Bali, 2004,2005,2007

b. Siswa Mengulang Kelas

Mutu pendidikan, antara lain dapat diukur dari angka siswa yang mengulang kelas. Tingkat angka siswa mengulang kelas merupakan salah satu indikator kualitas *out-put* (keluaran) pendidikan. Disamping itu, tinggi rendahnya persentase siswa mengulang kelas juga menandakan baik buruknya kualitas sumberdaya manusia. Semakin tinggi persentase siswa yang mengulang kelas berarti semakin banyak anak-anak yang IQ nya rendah, sebaliknya semakin kecil persentase siswa yang mengulang kelas berarti siswa kita semakin pintar.

Siswa Mengulang di SD, SMP dan SMA

Jika dilihat dari data angka mengulang kelas di tingkat Sekolah Dasar (SD), nampaknya ada hubungan antara tingkat kemiskinan masyarakat dengan tinggi rendahnya siswa mengulang kelas. Seperti halnya Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Buleleng yang sampai saat ini tergolong Kabupaten yang KK miskinnya paling banyak, ternyata persentase siswa mengulang

kelasnya pada tahun 2006 di Kabupaten Buleleng mencapai angka paling tinggi yakni 48,0% dan Karangasem mencapai 12,8 persen. Sementara itu persentase siswa mengulang kelas paling rendah adalah di Kabupaten Badung yang nota bene merupakan Kabupaten terkaya di Bali.

Tabel 5
Persentase Siswa Mengulang Kelas Tingkat SD Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2006.

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2006								
		SD			SMP			SMA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1.	Buleleng	34.7	13.2	48.0	0.2	0.1	0.3	0.11	0.02	0.12
2.	Jembrana	4.4	2.2	6.6	0.2	0.0	0.3	-	0.08	0.08
3.	Tabanan	4.8	3.3	8.2	0.0	0.0	0.0	-	-	-
4.	Badung	2.3	1.8	4.1	0.1	0.1	0.2	0.10	-	0.10
5.	Gianyar	3.5	4.2	7.7	0.0	0.0	0.1	0.12	-	0.12
6.	Klungkung	5.7	5.5	11.2	2.1	0.5	2.6	-	-	-
7.	Bangli	3.4	5.4	8.9	0.1	-	0.1	-	-	-
8.	Karangasem	5.5	7.3	12.8	0.2	0.1	0.3	0.02	0.03	0.05
9.	Denpasar	1.9	1.0	3.0	0.0	-	-	0.10	0.04	0.13
	BALI	8.8	4.5	13.4	0.2	0.06	0.3	0.07	0.02	0.09

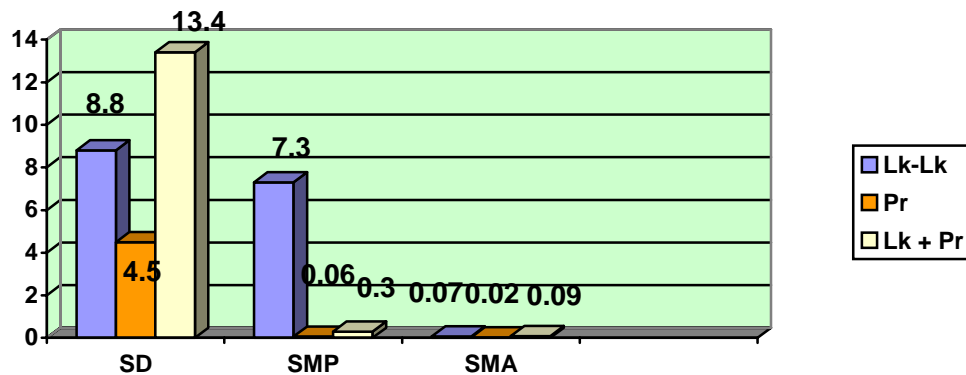
Sumber : Diolah dari Statistik Persekolahan SD/MI Provinsi Bali, 2007

Jumlah siswa mengulang di tingkat SMP nampaknya jauh lebih kecil jumlahnya dibandingkan siswa mengulang di tingkat SD. Ada kecenderungan semakin tinggi tingkat pendidikan semakin kecil persentase siswa yang mengulang kelas. Secara umum persentase siswa mengulang kelas tahun 2006 di bawah satu persen, malahan di beberapa Kabupaten/ kota tidak ada satupun siswa SMP yang mengulang kelas.

Di tingkat SMA kondisi siswa mengulang kelas pada tahun 2006 tidak terlalu jauh berbeda dengan di SMA yakni di bawah satu persen. Di beberapa kabupaten seperti kabupaten malahan tidak ada siswa mengulang kelas di SMA seperti kabupaten Tabanan, Kelungkung dan Bangli. Untuk lebih jelasnya persentase siswa mengulang kelas jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA di masing-masing Kabupaten seperti tergambar pada Tabel 5. Ditinjau dari perspektif gender, ternyata secara umum persentase siswa laki-laki yang

mengulang kelas jauh lebih tinggi dibandingkan siswa perempuan. Hal ini tergambar secara jelas pada grafik 2 berikut ini.

Grafik: 2 Persentase Siswa Mengulang Kelas jenjang Pendidikan SD,SMP dan SMA Menurut Jenis kelamin Tahun 2006



c. Siswa Putus Sekolah Tingkat SD, SMP dan SMA.

Kondisi kemiskinan penduduk yang masih relatif menonjol di beberapa Kabupaten/kota di Bali seperti di Kabupaten Buleleng dan Karangasem secara umum cukup mempengaruhi tinggi rendahnya angka putus sekolah. Disamping karena faktor kemiskinan ekonomi dan rendahnya pemahaman terhadap pentingnya pendidikan, faktor geografis juga seringkali menjadi penyebab terjadinya putus sekolah. Putus sekolah dalam hal ini dimaksudkan penduduk yang tidak menyelesaikan pendidikannya baik di jenjang pendidikan dasar maupun jenjang pendidikan menengah dan lanjutan. Angka siswa putus sekolah SD, SMP dan SMA di masing-masing Kabupaten/kota dan Provinsi Bali pada tahun 2006 seperti tampak pada Tabel 6.

Tabel: 6
 Angka Putus Sekolah Tk.SD, SMP dan SMA Menurut Kab./Kota dan Jenis kelamin Tahun 2006
 (dalam %)

No	Kabupaten/Kota	Tahun								
		SD			SMP			SMA		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
1.	Buleleng	11.4	1.1	12.4	0.4	0.2	0.6	0.93	0.53	1.46
2.	Jembrana	0.0	0.1	0.1	0.5	0.4	0.9	0.42	0.47	0.89
3.	Tabanan	0.0	0.0	0.1	0.3	0.2	0.5	0.54	0.50	1.03
4.	Badung	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.6	0.47	0.28	0.75
5.	Gianyar	0.3	0.1	0.4	0.2	0.1	0.4	0.39	0.19	0.58
6.	Klungkung	0.1	0.0	0.1	0.4	0.2	0.6	0.28	0.24	0.53
7.	Bangli	0.1	0.2	0.3	0.9	0.7	1.7	0.17	0.21	0.38
8.	Karangasem	0.3	0.3	0.5	0.8	0.6	1.4	0.65	0.28	0.94
9.	Denpasar	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.25	0.21	0.46
	BALI	2,0	0,2	2,2	0,4	0,26	0,6	0,48	0,33	0,81

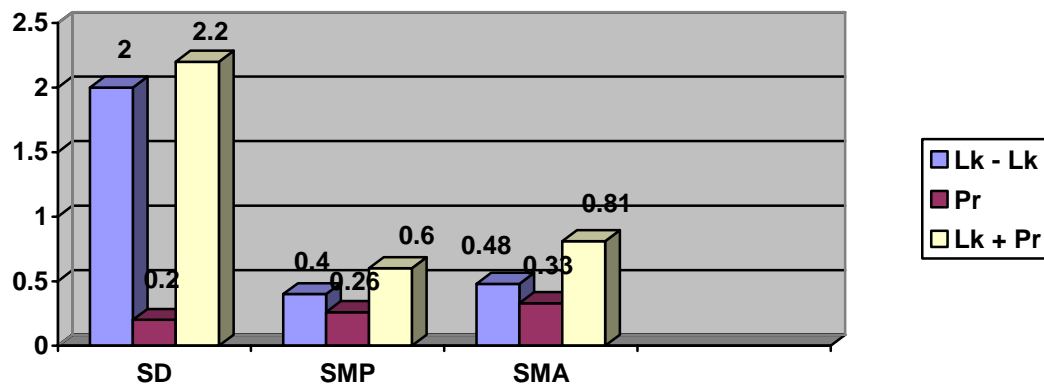
Sumber : Diolah dari Statistik Persekolahan SD/MI Provinsi Bali, 2004,2005,2007

Dari Tabel 6 di atas nampak bahwa prosentase angka putus sekolan di tingkat sekolah dasar pada beberapa Kabupaten masih cukup menonjol. Pada tahun 2006 angka putus sekolah SD tertinggi terjadi di Kabupaten Buleleng yakni laki-laki 11,4% dan perempuan mencapai 1,1 %. Kabupaten lain yang angka DO nya cukup tinggi adalah Kabupaten Karangasem dan Gianyar.

Angka putus sekolah di jenjang pendidikan SMP nampaknya juga masih relatif tinggi.. Dari tabel 6 terlihat bahwa tahun 2006 Kabupaten yang persentase siswa putus sekolah tingkat SMP paling tinggi adalah Kabupaten Bangli dan Karangasem. Sementara persentase angka putus sekolah terendah adalah di Kota Denpasar dan Badung.

Sementara itu angka siswa putus sekolah di tingkat SMA secara umum relatif kecil yakni di bawah satu persen kecuali di Kabupaten Buleleng dan Tabanan angka putus sekolahnya di atas 1 %. Dilihat dari perspektif gender nampak bahwa secara umum angka putus sekolah lebih banyak dialami oleh laki-laki dibandingkan perempuan. Kalau dilihat secara umum angka putus sekolah SD, SMP dan SMA di Bali pada tahun 2006 seperti tampak pada gambar berikut.

Grafik 3. Persentase Siswa Putus Sekolah Tingkat SD di Provinsi Bali Tahun 2006.



d. Kelulusan Siswa SD, SMP dan SMA

Proses belajar mengajar yang didukung oleh tenaga pendidik yang berkualitas melalui program sertifikasi maka pada gilirannya menghasilkan siswa yang berkualitas juga. Tingkat kualitas siswa antara lain dapat diukur dari tingkat kelulusan siswa yang mengikuti ujian. Pada tahun 2006 tingkat kelulusan siswa pada tingkat sekolah dasar hanya satu kabupaten yang berhasil mencapai kelulusan 100 % yakni Kabupaten Tabanan. Dilihat secara umum untuk Bali kelulusan siswa mencapai lebih dari 99%.

Untuk jenjang SMP tingkat kelulusan siswanya secara umum nampaknya sedikit lebih rendah persentasenya dibandingkan dengan kelulusan tingkat SD. Untuk tingkat SMP tidak ada yang berhasil mencapai kelulusan 100% untuk siswa laki-laki dan perempuan, tetapi untuk siswa perempuan kabupaten Karangasem berhasil mencapai kelulusan 100%.

Dilihat tingkat kelulusan siswa di tingkat SMA nampaknya cukup bervariasi di setiap kabupaten/kota. Pada tahun 2006 tingkat kelulusan siswa di setiap Kabupaten/kota mencapai angka di atas 90% dan yang berhasil meraih kelulusan 100% hanya Kabupaten Kelungkung. Jika dilihat dari perspektif gender tingkat kelulusan siswa tahun 2006 di Bali ternyata persentase kelulusan

siswa perempuan sedikit lebih rendah dibandingkan tingkat kelulusan siswa laki-laki.

Tabel 7
Tingkat Kelulusan Siswa SD, SMP dan SMA menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota Tahun 2006.

No	Kabupaten/Kota	Tahun								
		SD			SMP			SMA		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
1.	Buleleng	99.24	99.90	99.56	88.78	85.82	87.37	89.67	95.59	92.26
2.	Jembrana	-	-	-	98.89	99.13	99.00	98.64	99.45	98.99
3.	Tabanan	100.00	100.00	100.00	98.77	98.22	98.49	97.93	97.16	97.54
4.	Badung	100.00	99.79	99.90	97.40	98.05	97.71	99.91	100.00	99.96
5.	Gianyar	99.88	100.03	99.96	97.62	98.48	98.05	96.91	96.45	96.70
6.	Klungkung	99.38	99.55	99.46	99.02	89.06	98.17	100.00	100.00	100.00
7.	Bangli	99.29	97.19	98.25	98.76	78.72	97.58	95.86	98.03	96.76
8.	Karangasem	99.89	99.94	99.92	94.86	100.00	97.03	92.49	92.79	92.61
9.	Denpasar	99.96	99.98	99.97	97.29	97.44	97.38	99.60	90.08	94.97
	BALI	99.72	99.73	99.73	96.23	95.85	96.06	96.46	95.68	96.10

Sumber : Diolah dari Statistik Persekolahan SD/MI Provinsi Bali, ,2005,2007

e. Penutup

Baik buruknya mutu dan relevansi pendidikan dapat diukur dari beberapa indikator pendidikan antara lain adalah kelayakan guru menurut tingkat pendidikannya, kualitas siswa dilihat dari angka mengulang kelas, angka putus sekolah, dan angka kelulusan siswa. Indikator-indikator lain yang penting berkaitan dengan mutu dan relevansi pendidikan tetapi tidak berhasil di bahas karena keterbatasan data antara lain: kelayakan guru menurut kesesuaian keahlian dengan bidang studi yang diajarnya, prestasi siswa (ranking), rata-rata lama mencari pekerjaan, dan lain-lain. Dilihat dari kelayakan guru menurut tingkat pendidikannya (ijazah yang dimiliki), sebagian besar (66,83 persen) guru SD berpendidikan diploma/sarjana muda, hanya 17,57 persen yang berpendidikan sarjana, dan selebihnya SLTA.

Dilihat dari perspektif gender, perbandingan guru laki-laki dan perempuan yang belum berpendidikan sarjana maupun yang sudah berpendidikan sarjana cukup seimbang. Pada proporsi guru jenjang pendidikan SMP telah terjadi peningkatan persentase guru yang berpendidikan sarjana (2006: 46,09 persen) tetapi dilihat dari perspektif gender masih terjadi kesenjangan dengan disparitas sekitar 2,85 persen dengan posisi perempuan tertinggal dibandingkan dengan guru laki-laki. Untuk guru pada jenjang pendidikan SMA, tingkat pendidikan guru sudah semakin maju,. Tetapi dilihat dari perspektif gender untuk guru berpendidikan sarjana masih terjadi kesenjangan gender sekitar 3,3 persen pendidikan guru perempuan tertinggal dibandingkan guru laki-laki.

Tinggi rendahnya mutu pendidikan juga dapat dilihat dari kualitas siswa (siswa mengulang kelas, siswa putus sekolah, dan kelulusan siswa). Dilihat dari perspektif gender, siswa mengulang kelas siswa laki-laki pada umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan siswa perempuan, kecuali untuk siswa SMP angka mengulang kelas siswa perempuan lebih tinggi daripada siswa laki-laki. Demikian juga siswa putus sekolah secara umum lebih didominasi oleh siswa laki-laki. Sementara itu untuk tingkat kelulusan siswa dapat dikatakan relatif bagus karena secara umum pada tahun 2006 kelulusan siswa SD, SMP dan SMA mencapai angka di atas 99,0% dan jika ditinjau dari perspektif gender ternyata angka kelulusan siswa perempuan lebih bagus dari pada siswa laki-laki.

Pustaka

Arjani, Ni Luh dan Sudantra, 2007. Profil Gender Bidang Pendidikan Provinsi Bali; Denpasar, PSW UNUD dan Dinas Pendidikan Provinsi Bali.

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali; 2006. Statistik Pendidikan Provinsi Bali; Denpasar, BPS.

Dinas Pendidikan Provinsi Bali; 2006. Statistik Persekolahan SD/MI, Provinsi Bali. Denpasar, Dinas Pendidikan.

Dinas Pendidikan Provinsi Bali; 2006. Statistik Persekolahan SMP Provinsi Bali. Denpasar, Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan Provinsi Bali; 2006. Statistik Persekolahan SMA dan SMK Provinsi Bali. Denpasar, Dinas Pendidikan